



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TASIMAN**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **422382**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 575.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m²/100 m² di GUNUNG KIDUL, WARISAN Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m²/63 m² di GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 1380 m² di GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 706 m² di GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 167.500.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA NF125TR / SPD MOTOR SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
4. MOTOR, HONDA F1C02N46L0A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOTOR, HONDA V1J02Q32L1A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 26.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 90.088.414

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---



Sub Total	Rp.	859.088.414
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	859.088.414

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.